

PELATIHAN LITERASI KOMUNIKASI POLITIK PEMILIH PEMULA SMA DARUL HIKAM BANDUNG

Syauqy Lukman, Anwar Sani dan Centurion Chandratama Priyatna

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

E-mail: syauqy.lukman@unpad.ac.id

ABSTRAK. Potensi pemilih pemula dalam tiap pemilu memang besar, terbukti KPU pun memberikan perlakuan khusus terhadap segmentasi ini dengan memberikan sejumlah kegiatan sosialisasi khusus pada pemilih pemula. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skeptisme dan antipasti politik dari kaum pemilih pemula memang masih sangat tinggi, dapat menghasilkan implikasi yang tidak baik terhadap partisipasi politik di masa yang akan datang. Dari pra-riset yang dilakukan, Pemilih pemula banyak yang merasa bahwa komunikasi politik yang dilakukan sejumlah actor politik dirasa berbau pencitraan dan kotor, hal ini berkontribusi terhadap pengetahuan dan sikap mereka terhadap aktivitas pemilu dan pilkada, bentuk nyata partisipasi politik bagi pemilih pemula. Solusi masalah ini adalah literasi komunikasi politik, khususnya bagi para pemilih pemula. Maka dari itu, tim kami dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi memutuskan untuk melakukan kegiatan pelatihan literasi komunikasi politik di SMA Darul Hikam Bandung. Banyak partisipan kegiatan ini yang awalnya kurang terinformasikan mengenai sejumlah pengetahuan dasar tentang komunikasi politik, menjadi lebih kenal tentang fenomena tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300-an peserta.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Literasi Politik, Pemilih Pemula

ABSTRACT. The potential of first-time voter in each general election is very significant, in which The Indonesian Commission for General Elections (Komisi Pemilihan Umum; KPU) identifies first-time voters as one of the five special categories of voters which also includes the disabled people, women, elderly people, and marginalized people (the deprived, LGBT, ethnic/religious minorities, etc.). These five categories of voters are identified as strategic groups by the KPU, urging KPU to constantly attempting to establish an engagement through socialization and training, to educate voters that belong to these categories. Skepticism and antipathy towards political issues are common for first-time voters, an issue that need to be addressed for a better political participation of the community. The solution for this matter is literacy in political communication, particularly for the first-time voters. As a Community service activity, which is part of University's Tridharma, our team decided to conduct a workshop on political communication literacy in Darul Hikam High School Bandung. Many participants whom were uninformed with many basic knowledges on political communication became more aware of the phenomenon through this activity, in which approximately 300 students took part in the workshop.

Key words: Political Communication, Political Literacy, First-Time Voter

PENDAHULUAN

Ajang pemilihan umum untuk level kepala daerah, kepala negara, dan anggota legislatif daerah, selalu menjadi issue yang menarik dalam dunia politik di Indonesia. Selain selalu menjadi issue yang menarik, pelaksanaan pemilu juga kerap menghadirkan permasalahan dan polemik yang seringkali berimbas pada berbagai aspek kehidupan. Contoh yang paling terkini, adalah 'gaduh'-nya komunikasi politik sehubungan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017

Kegaduhan politik, selain diakibatkan oleh komunikasi dari para aktor politik, juga semakin diramaikan oleh para anggota masyarakat, termasuk kalangan pemilih pemula yang memang sangat aktif menggunakan media sosial berbasis daring.

Partisipasi politik pemilih pemula memiliki peranan yang penting bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Di Jawa Barat, untuk Pilkada serentak 2017 ini (Pilkada Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya), tercatat ada 76.723 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merepresentasikan 2.72 persen dari total DPT. Angka tersebut kurang lebih setengah dari angka Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ketiga wilayah tersebut yang mencatatkan angka DP4 sebanyak

149.086 pemilih pemula. Sedangkan pada pilkada 2015 di mana terjadi pemilihan kepala daerah untuk 8 wilayah di Jawa Barat, tercatat ada 227.568 DPT pemilih pemula yang merepresentasikan 1.93 persen angka seluruh pemilih (data KPU Pusat).

Potensi pemilih pemula dalam tiap pemilu memang besar, terbukti KPU pun memberikan perlakuan khusus terhadap segmentasi ini dengan memberikan sejumlah kegiatan sosialisasi khusus pada pemilih pemula. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skeptisme dan antipasti politik dari kaum pemilih pemula memang masih sangat tinggi, dapat menghasilkan implikasi yang tidak baik terhadap partisipasi politik di masa yang akan datang. Dari pra-riset yang dilakukan, Pemilih pemula banyak yang merasa bahwa komunikasi politik yang dilakukan sejumlah actor politik dirasa berbau pencitraan dan kotor, hal ini berkontribusi terhadap pengetahuan dan sikap mereka terhadap aktivitas pemilu dan pilkada, bentuk nyata partisipasi politik bagi pemilih pemula.

Kenyataan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap proses pemerintahan seperti memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi politik dalam memberikan kritik

dan saran kepada pemerintah untuk proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam berbagai level masih rendah. Kurangnya pendidikan politik yang diberikan orang tua juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik anggota keluarga. Dalam sebuah artikel di harian umum *Pikiran Rakyat*, tentang pemilih pemula, didapati bahwa para pemilih pemula masih skeptis atas partisipasi politiknya, meskipun banyak juga yang merasa antusias.

Dari temuan pra-riset, didapati fakta bahwa pemilih pemula merasa kurang nyaman untuk melakukan partisipasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan politik karena pesan-pesan komunikasi politik yang mereka terima, kebanyakan mereka terima dari sosial media, terlalu gaduh, banyak issue-issue yang sifatnya memecah belah seperti *hate speech*, pembunuhan karakter, dan hal-hal lain yang membuat mereka enggan berpartisipasi.

Adalah salah satu tanggung jawab KPU untuk memberikan politik kepada pemilih pemula, selain perlu juga adanya peran dari guru untuk mencerdaskan pengetahuan politik para pemilih pemula. KPU sebagai regulator pemilu, juga perlu merumuskan sebuah kebijakan yang mengatur kebijakan komunikasi politik bagi para aktor politik dalam aktifitas Pemilu terhadap pemilih pemula. Inilah yang berusaha ditemukan solusinya oleh penelitian ini.

Studi ini mencoba memetakan beberapa referensi penelitian terkait partisipasi politik pemula yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dari riset ini, dihasilkan sebuah sintesa terkait kajian-kajian kondisi partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia yang perlu dicarikan solusinya demi terwujudnya gairah demokrasi di kalangan pemilih pemula.

Komunikasi Politik

Menurut Almond (1960), komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. *“All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication.”*

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

Partisipasi Politik

Jika meninjau definisi dalam Kamus Politik, partisipasi adalah Ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2013;363). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi

pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola, 2009; 222).

Selanjutnya Miryam Budiardjo (dalam Efriza, 2012) mengatakan partisipasi secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlement, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya (Efriza, 2012;126). Maran (2007:156) yang menyebutkan faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik yaitu:

- Perangsang politik adalah suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, diskusidiskusi formal dan informal.
- Karakteristik pribadi seseorang adalah watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
- Karakteristik sosial adalah status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas.
- Situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik.
- Pendidikan politik adalah upaya pemerintah untuk merubah warga Negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik.

Kompleksitas dari berbagai faktor pendorong tersebutlah yang membuat partisipasi politik menjadi sulit untuk diprediksi. Aspek-aspek ini pulalah yang sering menjadi dasar atau bahkan menjadi fokus sejumlah penelitian terkait partisipasi politik, termasuk untuk segmentasi pemilih pemula.

Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Sedangkan menurut definisi dalam website KPU, Modul “Pemilu untuk Pemula” http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1a.pdf diakses 20 Juli 2017. Pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17-21 atau yang suda menikah atau mereka yang baru pertama kali memiliki pengalaman memilih, yang pada pilkada periode yang lalu belum genap berusia 17 tahun. Dalam pendidikan politik kelompok pemuda yang baru pertama kali akan melakukan hak pilihnya disebut pemilih Pemula. Ada juga kalangan yang lebih longgar memberikan batasan bagi pemilih pemula yakni TNI/Polri yang baru pensiun dan kembali menjadi warga sipil yang memiliki hak memilih juga dikategorikan sebagai pemilih pemula. Seperti diketahui saat menjadi anggota TNI/Polri mereka tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Setelah mereka memasuki masa pension dalam usia tertentu, barulah mereka memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan proposal ini akan diusulkan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menyikapi fenomena tersebut. Dalam kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini, tim dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, berusaha menyikapi hal tersebut dengan menggagas sebuah kegiatan kampanye bijak penggunaan sosial media internet yang akan difokuskan pada SMA Darul Hikam Bandung. Pemilihan SMA Darul Hikam, dikarenakan sekolah ini adalah sekolah yang dimiliki aksesnya oleh tim pelaksana PPM, serta kriterianya sesuai untuk dijadikan target pelaksanaan PPM berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh tim mengenai perilaku literasi media internet sehubungan dengan komunikasi politik.

Ke depannya, aktifitas kampanye ini diharapkan dapat dijadikan *pilot* untuk kampanye yang sama, diterapkan pada sekolah lain, atau bahkan komunitas pelajar secara umum. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian pada masyarakat turut melibatkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa Barat sebagai narasumber ahli.

METODE

Dalam mewujudkan upaya yang telah dipaparkan diatas maka kegiatan PPM ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Lokakarya, metode ini digunakan untuk memberikan pembelajaran yang singkat namun intensif kepada peserta mengenai literasi media sosial internet seputar komunikasi politik pemula, sehingga peserta mampu melaksanakan aktifitas media sosial dengan lebih bijak.
- Ceramah Interaktif. Metode ceramah ini dikemas secara interaktif akan tidak menimbulkan kebosanan dikalangan para peserta, serta memberikan ruang yang bebas untuk melakukan diskusi dan tanya jawab.
- Diskusi, metode ini digunakan untuk menghimpun pendapat serta pengalaman peserta mengenai topik PPM.

- Praktik/Latihan. Mekanismenya dengan membagi para peserta dalam beberapa kelompok dengan setiap kelompok didampingi oleh tim PPM untuk melakukan kampanye literasi media sosial komunikasi politik pemula yang lebih baik dan bijak. Tahapan selanjutnya adalah *coaching* dengan melakukan pembimbingan pelajar dalam menyelenggarakan kampanye tersebut.
- Monitoring dari pihak tim PPM agar dapat menularkan *awareness* bijak menggunakan sosial media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat sudah menyelesaikan tahapan Survey, pembuatan modul, dan koordinasi dengan pihak sekolah, yaitu SMA Darul Hikam Bandung Bandung. Kegiatanpun sudah dilaksanakan pada Agustus silam dan melibatkan 300-an orang siswa dari SMA Darul Hikam.



Gambar 1. Suasana Aula Darul Hikam saat pelatihan



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Dra. Hj. Elis Kartini, M.Si. dari KPU Jabar

Kegiatan sudah dijalankan pelaksanaannya pada hari Jumat, 16 Agustus 2017. Selain ada sesi pemberian materi dari tim PPM yang memberikan materi terkait bijak penggunaan social media dalam konteks komunikasi politik, tim PPM juga mengundang pemateri dari KPU Jabar, yaitu Dra. Hj. Elis Kartini, M.Si., Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Jabar yang memberikan materi sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula.

Kegiatan berjalan dengan lancar, bertepatan dengan aktivitas kegiatan pemilihan ketua OSIS di SMA Darul Hikam Bandung. Pada momen yang bersamaan, tim PPM yang juga melaksanakan penelitian RFU dengan

topik yang sama, juga menyebarkan kuisioner penelitian untuk berusaha memetakan preferensi media di kalangan pemilih pemula terkait komunikasi politik.



Gambar 3. Suasana Pelatihan



Gambar 4. Foto bareng di akhir kegiatan

Kegiatan ini Pemberitaan kegiatannya dipublikasikan di harian umum Pikiran Rakyat pada edisi 22 Agustus 2017. Selain itu, salah satu anggota tim mempresentasikan artikel terkait pemilih pemula sudah dipresentasikan dalam konferensi internasional *“Media and Transformation in Germany and Indonesia: Dynamics and Regressions in Global Perspective a collaborative international conference, co-organized by the Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD), Indonesia and the University of Erfurt, Germany, sponsored by the German Academic Exchange Service (DAAD) in the program. Kegiatan ini diadakan pada November 1 – 3, 2017 lalu.*

SIMPULAN

Karena proses PPM sudah berlangsung, berdasarkan diskusi dengan pihak sekolah dan peserta, juga animo kuisioner penelitian yang cukup baik (194 responden)

maka tim PPM berkesimpulan bahwa proses PPM dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. sudah berlangsung dengan cukup baik, di mana koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sudah berjalan dengan sangat baik. Diharapkan kegiatan yang terlaksana dengan sama baiknya juga, memang terlaksana sesuai dengan tujuan kegiatan PPM dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Tim pelaksana PPM menyarankan agar aktivitas ini dapat dijadikan prototype program kegiatan yang dapat mendukung aktifitas Sosialisasi dari KPU Jabar sebagai bagian dari pemerintah yang memang berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat mengenai komunikasi politik. Tidak semua sekolah memberikan edukasi mau pun pengenalan yang layak terkait pelaksanaan pemilu. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mungkin dapat menjadi alternative sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap pemilih pemula, khususnya di level pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel and James S. Coleman, Eds.. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1960.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
- Kaelola Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta
- Marbun, B.N. 2013. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Interview dengan Brigjen Rikwanto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, 16 Maret 2017
- Modul “Pemilu untuk Pemula” http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1a.pdf diakses 20 Juli 2017.
- Interview dengan Drs. Teppy W. Dharmawan, S.H.Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, 20 Juli 2017
- “Pemilu 2014, Feel the Excitement, Be a Part of It!” harian umum Pikiran Rakyat, 26 Maret 2014
- Diskusi kelompok terpumpun di SMAN 1 Katapang, medio 2015 tentang komunikasi politik
- Data Pemilu dan Pilkada KPU Pusat 2014-2017
- Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum